

Membangun Hubungan Damai Indonesia dan Timor-Leste: Kerjasama Negara dan Masyarakat Sipil¹

Badrus Sholeh²

Indonesia dan Timor-Leste Menyajikan sebuah kasus, di zaman modern, sangat unik. Kita tidak menyembunyikan kebenaran, tetapi memilih rekonsiliasi' (Gusmão 2013, h.378).

Pendahuluan

Timor Timur atau kini Timor-Leste merupakan negara tetangga terdekat Indonesia. Tidak hanya karena mereka berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur tetapi mereka juga pernah menjadi bagian dari Indonesia antara 1975-1999, sekitar dua puluh empat tahun. Sejak menang jajak pendapat, Timor-Leste menjadi negara berdaulat. Tetapi hubungan dengan Indonesia sudah menjadi pilihan yang tak terelakkan. Tidak saja karena sebagian masyarakat Timor-Leste memiliki kesamaan kebudayaan dengan beberapa komunitas di Timor Barat tetapi juga akan menjadi negara sahabat terdekat. Beberapa fakta juga mendukung persahabatan kedua negara. Pertama, bahasa Indonesia secara konstitusional diakui oleh pemerintah dan negara Timor-Leste sebagai bagian dari bahasa resmi selain bahasa Portugis dan Tetun. Ini juga didukung dengan mudahnya masyarakat Timor-Leste memahami bahasa Indonesia justru tidak melalui sekolah, tetapi lewat televisi. Hampir semua stasiun TV dari Indonesia bisa diakses dengan baik di Dili. Setelah lebih dari sepuluh tahun berpisah dari Indonesia masyarakat Timor Leste tetap merasa memiliki hubungan khusus dengan Indonesia melalui bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Seorang jurnalis televisi di Dili menyatakan bahwa 'Bahasa Portugis cukup susah untuk dipelajari, sementara kosakata bahasa Tetun masih terbatas. Karena itu, jika ingin menjelaskan sesuatu dan tidak ditemukan persamaan katanya, kami gunakan bahasa Indonesia, lebih mudah dan simpel' (Prabowo 2012). Selain pengaruh media televisi, masyarakat terpelajar di Timor Leste juga masih menggunakan buku-buku berbahasa Indonesia sebagai sumber belajar mereka. Toko buku yang ada di Dilli lebih banyak menjual buku-buku ekonomi, kesehatan, politik dan sosial budaya dalam Bahasa Indonesia dari pada bahasa portugis atau bahasa Inggris. Disamping harganya lebih murah, juga memenuhi kebutuhan belajar-mengajar mereka. Buku-buku dan majalah dalam bahasa Tetun mulai digalakkan.

Hubungan *people to people* ini kemudian 'memaksa' pemimpin kedua negara untuk lebih memilih jalur 'persahabatan' dari pada proses politik dan hukum yang panjang. Apakah proses ini menjadi jaminan atas transisi demokrasi dan pembangunan di Timor-Leste yang damai dan bermartabat? Pertanyaan ini akan menjadi pembahasan strategis yang dikaji lebih lanjut. Kedua, hubungan perdagangan baik formal (pemerintah) maupun informal (masyarakat). Kedekatan masyarakat kedua negara menjadi pesan penting bahwa masyarakat kedua negara bersahabat dekat. Kedekatan ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian mafia di perbatasan Timor-Leste dan Indonesia untuk keluar masuk barang di perbatasan secara illegal. Artikel ini akan membahas dinamika hubungan antara Indonesia dan Timor-Leste pasca referendum 1999, bagaimana hubungan damai disepakati dan dilaksanakan baik oleh negara maupun masyarakat sipil.

¹ Dipresentasikan dalam 4th Timor-Leste Studies Association (TLSA) Conference "Understanding Timor-Leste 2013", Lieeu Campus UNTL Dili, 15-16 Juli 2013. Terimakasih atas masukan draft awal dari Murizal Hamzah, Abdullah Hadi Sگران, Edy Mahmud dan Alwiah Aly Hosman. Terimakasih atas bantuan Deakin University untuk melakukan riset dan konferensi di Dili, Timor Leste, juga bantuan untuk mempertemukan berbagai narasumber di Dili dari Bapak Arif Abdullah Sگران.

² Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kandidat PhD dari Deakin University Melbourne, Australia.

Kedekatan budaya dan hubungan ekonomi kedua negara ‘memaksa’ kedua belah pihak mengubur masa lalu yang kelam menuju masa depan yang damai dan saling menguntungkan.

Hubungan Damai Indonesia dan Timor-Leste

Dinamika hubungan Indonesia dan Timor-Leste mengalami proses panjang dan berliku. Pasca referéndum 1999 hubungan kedua negara berdaulat berlanjut dengan pola berbeda. Dibanyak negara pasca konflik dan perang ada proses pengungkapan kebenaran yang terjadi pada masa konflik dan perang. Langkah ini bagian dari tujuan utama perdamaian dan rekonsiliasi. Karena itu dikenal istilah *Truth and Reconciliation Commission* (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, KKR) sebagaimana amanat MoU Helsinki 2005 perjanjian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia dinyatakan dalam pasal 2 tentang Human Rights ayat 2: ‘A Commission for Truth and Reconciliation will be established for Aceh by the Indonesian Commission of Truth and Reconciliation with the task of formulating and determining reconciliation measures’ (Kingsbury 2006, h. 203). Hingga kini KKR mengalami *deadlock* akibat belum adanya payung Undang-undang ditingkat nasional. Menurut mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bahwa ‘tanpa payung hukum ditingkat nasional, maka akan sulit bagi KKR ditingkat Aceh untuk ditindaklanjuti karena akan melibatkan banyak departemen dan lintas sektoral (Irwandi 2013). Kini Qanun KKR sedang diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan diperkirakan selesai Desember 2013. Rencananya Qanun KKR Aceh akan dijadikan lembaga permanen untuk mengantisipasi proses peradilan, pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi yang membutuhkan waktu antara sepuluh hingga duapuluh tahun (Aritonang 2013). Tentu saja proses di Aceh harus ditopang oleh keterbukaan dan inisiatif positif dari Jakarta bahwa proses rekonsiliasi semestinya menjadi prioritas pasca Orde Baru dimana banyak konflik etnis, agama dan separatisme membutuhkan kekuatan bersama untuk diatasi. Dinamika di Timor-Leste berbeda dengan mengganti kata ‘Rekonsiliasi’ menjadi ‘Persahabatan’. Ini mencerminkan niat baik khususnya dari Timor Leste untuk lebih mengutamakan kebaikan bagi masa depan pembangunan di Timor Leste yang jauh tertinggal dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.

Terbentuknya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP, *The Commission of Truth and Friendship*) Indonesia –Timor-Leste adalah produk politik yang mengutamakan hubungan damai dan saling menguntungkan antar kedua negara: Indonesia dan Timor-Leste. Kiki Syahnakri yang lebih dari satu dekade bertugas sebagai TNI di perbatasan dan di Timor-Timur menyatakan:

Muara dari pekerjaan KKP adalah persahabatan. Target besar ini hanya bisa dicapai melalui itikad baik dan upaya positif dari semua pihak terutama KKP sendiri melalui proses yang relatif bersih, dengan data akurat, bukti yang valid dan kesaksian yang benar. Intisari dari persahabatan adalah sikap saling menerima, saling menghormati dan saling menghargai dijiwai spirit keadilan, kesetaraan dan perdamaian (Syahnakri 2009, h. 121).

Kiki Syahnakri adalah sedikit diantara tentara yang pernah bertugas dalam operasi di Timor-Leste yang menguasai bahasa Tetun. Melalui Syahnakri banyak orang Timor-Leste bergabung menjadi bagian dari tentara Indonesia. Pandangan Syahnakri tentu diplomatis dengan mendukung proses KKP untuk kebersamaan Timor-Leste dan Indonesia dimasa depan.

Argumen Syahnakri seiring dengan Xanana Gusmão, Perdana Menteri Timor-Leste (2012-2017) yang menyatakan bahwa:

Timor-Leste dan Indonesia telah memilih jalan yang sama untuk ditelusuri, dengan menatap kedepan! Perdamaian harus dicapai dengan upaya bersama, dimana terdapat saling pengertian tentang kesulitan-kesulitan, pemahaman tentang berbagai masalah yang berdampak terhadap kedua belah pihak, kemauan untuk menyelesaikannya lewat jalan paling layak dan damai, penghormatan terhadap situasi dan kondisi yang dialami masing-masing pihak, dan dialog yang diadakan terus-menerus untuk mempromotif rekonsiliasi! (Gusmão 2013, h. 379).

Perubahan rejim kedua negara dari otoritarian-perang menuju demokrasi damai memaksa para pemimpin kedua negara untuk mengedepankan perdamaian, persahabatan dari pada mengungkap sejarah kelam selama dua puluh empat tahun masa pendudukan Indonesia di Timor-Timur yang menyebabkan ratusan ribu orang meninggal dari kedua negara, khususnya korban dari Timor-Timur. Barangkali para pemimpin kedua negara belajar dari sulitnya pengadilan HAM pasca perang dan konflik diberbagai negara. Kamboja adalah contoh paling menarik dimana hanya beberapa orang saja yang diadili oleh pengadilan HAM Kamboja dan internasional. Bagi masyarakat Kamboja proses peradilan seperti ini tentu tidak fair terutama bagi korban kekejaman Polpot yang membantai masyarakat sipil secara membabi buta demi kelangsungan kepemimpinannya (Soy Sok, 2013). Belajar dari banyak pengalaman pelaksanaan yang tidak adil atas peradilan HAM pasca konflik dan perang, dan terutama demi kepentingan kesejahteraan kedua negara, khususnya Timor-Leste yang baru merdeka untuk kedua kalinya, maka ‘persahabatan’ lebih bermakna dari pada ‘keadilan’.

Dalam persahabatan ada proses rekonsiliasi. Dukungan penuh Indonesia bagi Timor-Leste sebagai calon anggota ASEAN menunjukkan sikap politik Indonesia yang mendukung eksistensi Timor-Leste di dunia internasional. Bagi pemerintah Timor-Leste, pilihan untuk menjadi anggota ASEAN menjadi prioritas utama. Xanana Gusmão menyatakan bahwa ‘the membership in ASEAN in a priority for the Timorese State, since we consider that it is extremely important to belong to this family and to extract the emplit advantages that derive from here: security, stability, economic development and regional cooperation’ (Gusmao 2012, h. 154). Perdana Menteri Gusmão yakin bahwa Timor-Leste bisa memberi manfaat sebagai jembatan (*connector*) antara ASEAN dan Forum Kepulauan Pasifik (*the Pacific Island Forum*) dalam melakukan kerjasama lebih luas (Timur 2013).

Persahabatan telah menunjukkan dukungan nyata ditingkat masyarakat sipil dan *grassroot* baik dikalangan pelajar dan pelaku bisnis. Ratusan pelajar dan mahasiswa dari Timor-Leste menimba ilmu di Indonesia. Mereka adalah aset terbaik bangsa untuk membangun hubungan persahabatan sejati. Masyarakat dan pemerintah Indonesia juga menyambut positif dan hangat keberadaan pelajar Timor-Leste di Indonesia dengan menyediakan beasiswa baik dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia, Kementerian Agama, maupun melalui Perguruan Tinggi di Indonesia. Hanya saja bagi banyak ilmuwan Indonesia, kajian terkait hubungan persahabatan Indonesia -Timor-Leste belum menjadi perhatian penting. Barangkali karena proses ini lebih nampak ‘politik’ dari pada gerakan dari bawah. Hubungan *grassroot* melalui pendidikan ini bisa menjadi fondasi kuat hubungan antar kedua negara. Melalui mereka hubungan semestinya digerakkan tidak hanya G (government) to G (government) tetapi juga akan lebih bermakna dan berkesinambungan jika P (people) to P (people) diperkuat. Kepada mereka lah hubungan kedua negara akan lebih sunbstansial. Tentu dengan dukungan kuat dari masyarakat internasional.

Hal ini juga diperkuat adanya hubungan budaya dan etnisitas kedua wilayah perbatasan. Menurut Yosef Naiobe dalam laporannya bahwa “Hubungan emosional yang dibangun melalui ikatan perkawinan antara negara Timor-Leste dengan Indonesia menyebabkan sebagian warga yang bermukim di daerah perbatasan kedua negara hidup secara damai dan menyatu satu sama lain” (Naiobe, *Sindonews.com*, 3 September 2013).

Masa Depan “Persahabatan”: Tantangan

Hubungan kedua negara mengalami tantangan yang harus dikendalikan secara seimbang dan bertahap. Sejarah dan geografis kedua negara mewarnai hubungan yang tidak mudah. Beberapa tantangan meliputi: sirkulasi perdagangan, kritik pelanggaran HAM dan kriminalitas. Situasi perbatasan yang kontras antara negara baru Timor-Leste dan masyarakat perbatasan Timor Barat di Indonesia menarik perhatian banyak pihak.

Ketergantungan Pemerintah dan rakyat Timor-Leste khususnya pasokan komoditi dari Indonesia membuat hubungan persahabatan tidak seimbang. Fakta ini memaksa pemerintah Timor-Leste lebih memilih untuk melupakan rekomendasi dunia internasional soal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sebagian elit militer Republik Indonesia. Selanjutnya, bagi Timor-Leste Indonesia juga pintu masuk untuk masuk menjadi anggota ASEAN. Sejak awal Indonesialah yang paling serius mendukung negara Timor-

Leste menjadi bagian dari ASEAN. Meskipun hingga kini belum resmi diterima sebagai anggota penuh, karena oleh sebagian pendiri ASEAN Timor-Leste dianggap belum siap terutama dalam kebijakan free trade ASEAN 2015.

Peradilan HAM internasional dalam menangani kejahatan perang seringkali tidak membuahkan hasil sesuai dengan harapan rakyat. Kamboja adalah salah satu contoh terdekat, bagaimana para elit Pemerintah Polpot diputuskan bersalah. Tetapi berbeda dengan kenyataan bahwa hanya segelintir pemimpin dinyatakan bersalah melalui proses peradilan yang sangat lama. Peradilan HAM tidak menjawab harapan masyarakat Kamboja. Gejala kekecewaan hingga kini masih hadapi. Para pasukan pembantai masa Polpot kini masih hidup bebas ditengah masyarakat yang menjadi korban mereka. Perasaan tidak enak dan kebencian masih menyala diantara masyarakat (Soy Sok, 2013).

Pengalaman Kamboja bisa menjadi pelajaran untuk negara dan daerah pasca konflik dan perang, apakah sangat dibutuhkan proses investigasi untuk membuka kebenaran (*truth*) dan memberi ruang rekonsiliasi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik atau antara pelaku dan korban. Sebagaimana di Aceh, Indonesia, masyarakat korban perang di Timor-Timur kini Timor-Leste juga berharap terutama kapan, dimana dan bagaimana terjadinya pembunuhan atau penyerangan atas diri mereka atau diantara keluarga mereka. Dalam pengalaman yang berbeda di Afrika bahwa kesaksian korban dalam komisi kebenaran melalui verifikasi bisa meningkatkan kesadaran pelanggaran hak asasi manusia sehingga simpati masyarakat terbangun yang bisa menjadi kontribusi kuat bagi *social healing* untuk masyarakat umum pasca perang (Hidayat 2011, h.30-31). Tetapi rekonsiliasi tidak harus selalu melalui proses peradilan. Kompensasi yang memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban juga bisa menjadi alternatif. Bagi masyarakat Timor-Leste yang masih kesulitan ekonomi sangat membutuhkan kebijakan ini. Banyak diantara mereka yang masih tinggal di barak-barak pengungsian di perbatasan Timor Barat seolah terlupakan. Mereka juga menjadi bagian dari proses *healing* ini.

Beberapa bentrokan antar mahasiswa Timor-Leste di Yogyakarta juga disebabkan oleh rasa 'ketidakadilan' antar mahasiswa Timor-Leste (Edy Mahmud 2013). Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Timor-Leste baik yang pro-kemerdekaan dan pro-independen menjadi salah satu 'PR' bagi kedua negara untuk menyelesaikannya secara baik. Setidaknya elit politik dan pemerintah kedua negara memiliki kesepakatan bersama untuk membangun persahabatan yang positif dan membangun kesepakatan ini tentu perlu terus dipantau dan dilaksanakan khususnya yang menyangkut *grassroot* kelompok masyarakat (termasuk pelajar) yang mengalami langsung potensi perpecahan, kekerasan dan bentrokan lapis bawah jika ada rasa keadilan yang masih mengganjal.

Memperkuat Persahabatan

Upaya penguatan persahabatan kedua negara menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari baik melalui hubungan antar pemerintah maupun masyarakat sipil. Ada beberapa kunci penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah Timor-Leste dan Indonesia. Pertama, sejarah 'memalukan' Indonesia soal Timor-Timur harus diubah menjadi energi yang lebih positif bagaimana dulu menjadi keluarga besar kini menjadi tetangga yang tetap harus dijaga hubungan baiknya. Kedua, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan satu diantara sedikit negara di Asia yang masuk G-20 (Islam 2011, h.165), perlu menjadi perhatian terutama bagi pola diplomasi Timor-Leste dan sebaliknya. Muslim Indonesia yang moderat dan toleran bisa 'diundang' oleh pemerintah dan masyarakat Timor-Leste untuk mengembangkan nilai-nilai agama yang toleran di Timor-Leste. Masyarakat Timor-Leste juga terus digalakkan untuk belajar di Indonesia baik melalui mekanisme kerjasama beasiswa negara atau pendekatan dengan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Dua pola ini akan bisa menjadi 'stimulan' penguat hubungan antar kedua negara.

Hingga kini trauma terbesar sejarah modern Indonesia adalah berpisahnya sebagian wilayah Indonesia. Prinsip Bineka Tunggal Eka (*Unity in Diversity*) menjadi semboyan politik dan budaya yang mengikat beragam suku, agama dan budaya menjadi satu Bangsa Indonesia. Dimata masyarakat Indonesia, 'berpisahnya' Timor-Timur menjadi negara merdeka berdaulat menghantui pemerintah dan masyarakat Indonesia apakah selanjutnya Papua bisa 'di Timor-Timurkan' oleh badan-badan internasional. Kekhawatiran ini muncul kembali pada awal Perdana Menteri Tony Abbott dimana Australia 'dianggap'

memiliki peran penting dalam pemisahan Timor-Timur dari Indonesia. Sejarah gelap ini mesti dikubur, dan diisi dengan lembaran sejarah baru hubungan lebih harmonis, saling menghargai dan positif bagi kedua negara. Keterbukaan pemerintah dan masyarakat Timor-Leste diwujudkan dalam memberi kesempatan kerjasama lebih dekat dengan Indonesia. Misalnya, dalam rekrutmen kenaikan pangkat di kepolisian Pemerintah Timor-Leste mengundang Tim penguji Mabes POLRI untuk menguji para prajurit yang akan naik pangkat. Demikian juga undangan untuk perusahaan Telekomunikasi Indonesia: Telkomsel untuk membuka investasi telekomunikasi di Timor-Leste . Kementerian Pekerjaan Umum juga mendapat kesempatan untuk mengendalikan proyek pembangunan di Timor-Leste. Hubungan saling menguntungkan ini akan memperkuat persahabatan kedua negara (Guterres 2013; da Costa 2013). Hubungan melalui kerjasama peningkatan sumberdaya manusia dan perdagangan juga mendapat tanggapan dari masyarakat khususnya kekhawatiran dominasinya investor dari Indonesia dan negara lain, khususnya China, akan menyingkirkan peran investor dan pengusaha lokal dalam persaingan investasi dan pembangunan di Timor-Leste (*East Timor Law and Justice Bulletin*, 7 Oktober 2013). Persaingan ini akan lebih kuat jika Timor-Leste resmi masuk dalam ASEAN, dan membuka diri dalam perdagangan bebas negara-negara ASEAN. Kesiapan masyarakat lokal membutuhkan kerja keras pemerintah, masyarakat dan terutama lembaga pendidikan di Timor-Leste.

Demikian juga melalui jalur pendidikan dan keagamaan akan memperkuat diplomasi baik secara formal maupun informal. Ratusan pelajar Timor-Leste kini belajar di Indonesia, melanjutkan tradisi pelajar Timor-Timur yang telah menamatkan studi Master dan doktoral di berbagai perguruan Tinggi ternama di Indonesia. Pemerintah Timor-Leste disamping mengarahkan mahasiswa untuk belajar di negara berbahasa Portugis, juga harus mendorong pelajar untuk menimba ilmu di Indonesia demi menjaga hubungan lebih kuat dan harmonis kedua negara. Identitas negara bekas koloni Portugis memang penting untuk Bangsa dan masyarakat Timor-Leste, tetapi keinginan kuat masyarakat untuk belajar di Indonesia harus mendapat dukungan pemerintah. Kedekatan budaya dan geografis memungkinkan masyarakat Timor-Leste meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dengan menjaga hubungan pendidikan kedua belah negara. Saya belum melihat aspek ini menjadi perhatian pemerintah. Bahkan cenderung diabaikan dalam mekanisme diplomasi. Rektor Universidade Dili (UNDIL), António Cardoso Caldas Machado yakin melalui kerjasama pendidikan yang lebih erat akan memupuk hubungan yang lebih kuat, harmonis dan berkesinambungan pemerintah dan masyarakat kedua negara. UNDIL secara rutin mengundang Professor dari Indonesia untuk mengajar di Dili, juga mengirim beberapa mahasiswa untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi terbaik di Indonesia (Machado 2013). Yang kurang adalah kesadaran mahasiswa dan pelajar Indonesia atas hubungan ini. Perlu dijalin kerjasama lebih intensif antar komunitas pendidikan Indonesia dan Timor-Leste.

Bibliografi

Wawancara

Adérito Hugo da Costa, Wakil Presiden Parlemen Nasional Timor-Leste, Wawancara dengan penulis, Dili, 16 Juli 2013.

Aniceto Guterres Lopes, Anggota Parlemen Nasional dan Ketua Fraksi Partai Fretilin, Wawancara dengan penulis, 17 Juli 2013.

António Cardoso Caldas Machado, Rektor/ Vice Chancellor Universidade Dili (UNDIL), wawancara dengan penulis, Dili, 18 Juli 2013.

Edy Mahmud, aktivis dan intelektual asal Timor-Leste, wawancara dengan penulis, Jakarta, Agustus 2013; Email, 13 Oktober 2013.

Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh, wawancara dengan penulis, Banda Aceh, 21 April 2013.

Soy Sok Ph.D, Aktivis HAM dari Kamboja, wawancara dengan penulis, Melbourne, 13 Mei 2013.

Buku, Jurnal dan Surat Kabar

- Alatas, Ali 2001, *A Voice for a Just Peace: A Collection of Speeches by Ali Alatas*. Jakarta/ Singapore: Gramedia dan ISEAS.
- Aritonang, Devtri Robekka 2013, 'KKR Aceh diusulkan Jadi Lembaga Permanen', *Kompas.com*, 27 September, <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/27/1959175/KKR.Aceh.diusulkan.Jadi.Lembaga.Permanen>, diakses 14 Oktober 2013.
- Coelho, Avelino M. 2012, *Dua Kali Merdeka Esei Sejarah Politik Timor Leste*. Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe.
- 'Fears of Foreign domination in East Timor economy and land by Chinese and Indonesian Investors', *East Timor Law and Justice Bulletin*, 7 Oktober 2013, <http://easttimorlegal.blogspot.com.au/2013/10/fears-of-foreign-domination-in-east.html>, diakses 15 Oktober 2013.
- Gusmão, Kay Rala Xanana 2013, 'Epilog', dalam Kiki Syahnakri, *Timor Timur the Untold Story*, Jakarta: KOMPAS.
- 2012. *Strategies for the Future*. Woollahra, NSW: Longueville Books.
- Harrington, Andrew 2007, *The Commission of Truth and Friendship Indonesia-Timor Leste: Competing Concepts of Justice*.
- Hidayat, Papang 2011, *Transitional Justice for Two Countries? The Commission for Truth and Friendship between Indonesia and Timor-Leste*. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG.
- Islam, Shada 2011, 'Indonesia's Rise: Implications for Asia and Europe', *European View* 10: 165-171.
- Kingsbury, Damien. 2006. *Peace in Aceh. A Personal Account of the Helsinki Peace Process*. Jakarta: PT Equinox Publishing Indonesia.
- Prabowo, Panca Hari 2012, 'Rasa itu Masih Ada di Timor Leste'. *Kompas.com*, 29 Mei <http://oase.kompas.com/read/2012/05/29/15310041/Rasa.Itu.Masih.Ada.di.Timor.Leste>, diakses 10 Oktober 2013.
- Robinson, Geoffrey. 'People's War: Militias in East Timor and Indonesia', *South East Asia Research*, 9 (3): 271-318.
- Naiobe, Yosef 2013, 'Warga Timor-Leste berkebud di Indonesia', *Sindonews.com*, 3 September, <http://daerah.sindonews.com/read/2013/09/03/27/778639/warga-timor-leste-berkebud-di-indonesia>, diakses 11 Oktober 2013.
- Syahnakri, Kiki 2013, *Timor-Timur The Untold Story*. Jakarta: KOMPAS.
- 2009, *Aku Hanya Tentara Catatan Militer, Kepemimpinan, dan Kebangsaan*. Jakarta: KOMPAS.
- Timur, Fitri Bintang 2013, 'Xanana Gusmão, Timor-Leste and Regional Politics'. *The Jakarta Post*, 17 Juni. <http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/17/xanana-gusmao-timor-leste-and-regional-politics.html> diakses 11 Oktober 2013.